

**THE IRON CAGE OF DIGITAL CORPORATISM:  
SEBUAH REFLEKSI KRITIS ATAS PRAKTIK KOPERASI DESA/  
KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP)**

Aip Zaenal Mutaqin<sup>1</sup>

Dosen Prodi Ekonomi Syariah, IAI PERIS Garut

Email : [aipzm@iaipersisgarut.ac.id](mailto:aipzm@iaipersisgarut.ac.id)

Received: 2025-09-20; Accepted: 2025-09-30; Published: 2025-12-23

**Abstrak**

Akselerasi transformasi digital dalam administrasi publik di Indonesia saat ini didorong oleh berbagai inisiatif nasional yang memanfaatkan platform digital dan kolaborasi dengan sektor korporasi teknologi. Salah satu program strategisnya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus fokus utama dalam digitalisasi lembaga koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis praktik KDKMP melalui lensa metafora "iron cage" (sangkar besi) milik Max Weber serta konsep digital corporatism dalam kerangka filsafat administrasi publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus konseptual. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, dasbor resmi KDKMP, pemberitaan media, serta literatur ilmiah mengenai birokrasi digital dan kritik administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi KDKMP berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, proses ini juga menciptakan "sangkar besi digital". Hal tersebut terjadi akibat standarisasi yang kaku, datafikasi, serta ketergantungan yang tinggi pada platform milik korporasi mitra pemerintah.

Studi ini menyimpulkan bahwa KDKMP merupakan manifestasi dari digital corporatism, di mana nilai ideal koperasi dan otonomi desa berisiko terpinggirkan oleh kepentingan negara-korporasi dan rasionalitas teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan reposisi kebijakan serta tata kelola digital yang lebih inklusif, partisipatif, dan berlandaskan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *iron cage, digital corporatism, KDKMP, koperasi desa, digitalisasi, filsafat*

**Abstract**

The digital transformation of public administration in Indonesia has accelerated through various national initiatives that rely on digital platforms and partnerships with technology corporations. A prominent program in this trajectory is the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), projected as a catalyst for village economies and a primary object of institutional cooperative digitalization. This study aims to reflectively and critically examine KDKMP practices using Max Weber's "iron cage" metaphor and the concept of digital corporatism within the perspective of public administration philosophy.

The research employs a qualitative approach with a conceptual case study design, based on an analysis of policy documents, KDKMP portals and dashboards, public news reports, and scholarly literature concerning digital bureaucracy, village cooperatives, and public administration critiques in Indonesia. The findings indicate that while the digitalization of KDKMP offers opportunities to enhance transparency, efficiency, and accountability, it

simultaneously constructs a "digital iron cage" through rigid standardization, datafication, and a high dependency on platforms and digital corporations partnered with the government.

This study argues that KDKMP represents a configuration of digital corporatism, wherein the ideals of cooperatives and village autonomy risk being subordinated by technocratic rationality and state-corporate interests. Consequently, a redesign of digital policy and governance is required—one that is more reflective, participatory, and oriented toward social justice.

**Keywords:** *iron cage, digital corporatism, KDKMP, village cooperatives, digitalization, philosophy.*

Copyright © 2025 : At-Tadhmin : Journal of Islamic Financial Management

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Gelombang digitalisasi dalam administrasi publik di Indonesia saat ini dicirikan oleh ekspansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan perizinan, serta pengaduan berbasis platform. Di tengah tren ini, pemerintah memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai inisiatif strategis nasional. Program ini bertujuan membangun ekosistem koperasi desa yang seragam, modern, dan terpadu dalam satu arsitektur kelembagaan serta digital yang terintegrasi. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025b)

Pemerintah memosisikan KDKMP sebagai solusi atas berbagai kelemahan koperasi konvensional sekaligus instrumen vital penggerak ekonomi desa demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan KDKMP juga dikaitkan dengan kemudahan akses pembiayaan, dukungan fiskal, serta berbagai program sektoral lainnya. Implementasi digitalisasinya didukung secara masif melalui pengembangan aplikasi khusus, penyediaan dasbor nasional, hingga pengajuan anggaran yang signifikan untuk mengoptimalkan ekosistem digital di tingkat desa. (Siswarini, 2025)

Namun, jika ditinjau dari perspektif filsafat administrasi publik, fenomena ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah desain kelembagaan dan digitalisasi KDKMP benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi desa dan nilai-nilai perkoperasian, atau justru menjebak aktor lokal ke dalam "sangkar besi digital" (digital iron cage) yang dikendalikan oleh rasionalitas teknokratis dan pola korporatisme digital?. (Maley, 2004a)

Hingga saat ini, kajian mengenai KDKMP masih didominasi oleh pembahasan mengenai strategi pengembangan, proyeksi potensi ekonomi, serta aspek teknis pemanfaatan teknologi untuk memacu kinerja koperasi. Sebaliknya, dimensi filosofis-kritis yang menyoroti rasionalitas birokrasi, relasi kuasa antara negara dan korporasi, serta dampak digitalisasi terhadap otonomi desa masih luput dari fokus perhatian utama, terutama dalam konteks teori iron cage dan digital corporatism. (Powell & DiMaggio, 2023)

Oleh karena itu, kebaruan utama penelitian ini terletak pada tiga pilar berikut:

- Integrasi Teoretis Lintas Disiplin: Menggabungkan konsep iron cage Weber, digital corporatism, dan filsafat administrasi publik untuk membedah praktik KDKMP sebagai sebuah konfigurasi kekuasaan dan rasionalitas tertentu, bukan sekadar inovasi teknis organisasi. (Maley, 2004a)

- Analisis Kritis Struktur Digital: Menawarkan perspektif kritis terhadap digitalisasi KDKMP sebagai "sangkar besi korporatisme digital". Analisis ini menyoroti ketegangan antara idealisme koperasi dan otonomi desa dengan logika standardisasi, datafikasi, serta dominasi kemitraan korporasi teknologi.
- Rekomendasi Kebijakan Berbasis Normatif: Mengajukan implikasi kebijakan yang berpijak pada refleksi normatif dengan mengorelasikan dimensi keadilan sosial, kemandirian desa, dan rasionalitas publik dalam merancang ulang tata kelola digital koperasi desa.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep *iron cage* dan birokrasi digital**

Dalam pemikiran Weber, *iron cage* menggambarkan situasi ketika rasionalitas formal yang berlandaskan aturan tertulis dan kalkulasi efisiensi membentuk struktur birokrasi yang sulit digugat dan mengekang kebebasan individu. Perkembangan teknologi informasi membuat rasionalitas tersebut terwujud bukan hanya dalam dokumen, tetapi juga di dalam sistem informasi dan algoritma yang memprogram langkah kerja aparatur dan organisasi. (Maley, 2004a)

Sejumlah studi menunjukkan bahwa digitalisasi justru dapat mempertebal "kandang besi" melalui pembatasan ruang diskresi, penguatan pengawasan berbasis data, dan penyeragaman prosedur yang dikunci dalam perangkat lunak. Namun demikian, konsep digital discretion juga menegaskan bahwa aktor di level operasional tetap memiliki ruang interpretasi dan negosiasi, meskipun dalam batas yang ditetapkan sistem. (Faedlulloh & Yulianto, 2023)

### ***Digital corporatism* dan tata kelola platform**

Literatur digital corporatism membahas bagaimana kapasitas negara, ekosistem platform digital, dan kepentingan ekonomi-politik korporasi saling mengunci dalam suatu konfigurasi yang memadukan administrasi publik, pasar, dan pengendalian sosial. Kasus Tiongkok, misalnya, memperlihatkan bagaimana negara menggunakan platform dan big data untuk memperkuat kapasitas kontrol dan koordinasi, sementara perusahaan teknologi menjadi mitra kunci dalam membangun infrastruktur digital negara. (Song et al., 2025)

Dalam konteks tata kelola layanan publik, platformisasi dipromosikan sebagai sarana co-production dan inovasi, tetapi juga menghasilkan ketergantungan baru terhadap vendor, arsitektur data terpusat, dan logika bisnis platform. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan data, terutama ketika desain sistem tidak sepenuhnya berada di bawah kendali publik. Administrasi publik Indonesia: kritik dan pendekatan kontekstual. (Rahman, 2025)

Reformasi administrasi publik di Indonesia banyak dipandu oleh diskursus good governance dan New Public Management yang menonjolkan efisiensi, kompetisi, dan pengukuran kinerja. Sejumlah pemikir mengkritik hegemoni paradigma tersebut karena cenderung mengabaikan konteks sosial, ketimpangan kekuasaan, dan nilai-nilai lokal, sehingga menyerukan pembangunan teori administrasi publik Indonesia yang lebih berakar pada kearifan lokal dan sejarah. (Widodo, 2022)

Dalam kerangka ini, filsafat administrasi publik memandang kebijakan dan birokrasi sebagai medan artikulasi nilai seperti keadilan, martabat, dan partisipasi, bukan sekadar instrumen netral. Program seperti KDKMP penting dibaca tidak hanya dari sisi “best practices” teknis, tetapi juga dari sisi bagaimana ia membentuk atau menggeser relasi antara negara, pasar, dan komunitas desa. (Huang & Tsai, 2022)

## **Metodologi Penelitian**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus konseptual atas KDKMP sebagai kasus tunggal yang memiliki cakupan nasional dan relevansi tinggi bagi tata kelola ekonomi desa. Studi kasus konseptual dipadukan dengan analisis refleksi kritis yang berakar pada filsafat administrasi publik, sehingga fokus analisis bukan pada pengukuran dampak kuantitatif, melainkan pada pembacaan terhadap rasionalitas, struktur kekuasaan, dan implikasi normatif dari desain dan praktik KDKMP. (Atlantis Press, 2018; Song et al., 2025; Кочетков & Мамычев, 2023)

### **Sumber data**

Data yang digunakan meliputi:

- Dokumen resmi, portal pendaftaran, dan informasi kebijakan terkait KDKMP. (Dinkominfo Bantul, 2025)
- Berita dan rilis resmi tentang pembentukan KDKMP, penguatan kelembagaan, kebutuhan anggaran digitalisasi, dan peran lembaga seperti LPDB dan kementerian terkait. (LPDB-KUMKM, 2025)
- Informasi mengenai platform digital koperasi (Digi Koperasi dan aplikasi sejenis) beserta fitur kasir, akuntansi, dan dashboard nasional. (Siswarini, 2025; Yuliani, 2025)
- Literatur ilmiah nasional dan internasional tentang birokrasi digital, digital corporatism, reformasi administrasi publik Indonesia, dan pengembangan koperasi desa. (Mulyawan, 2025)

### **Teknik Analisi: Refleksi Kritis**

Analisi dilakukan dengan tiga tahap:

1. Rekonstruksi deskriptif: memetakan tujuan, desain kelembagaan, dan skema digitalisasi KDKMP berdasarkan dokumen, portal, dan berita. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025a)
2. Interpretasi teoretik: mengkaitkan temuan dengan konsep iron cage dan digital corporatism, khususnya aspek rasionalitas formal, kontrol, dan relasi negara–korporasi–desa. (Maley, 2004b; Powell & DiMaggio, 2023)
3. Refleksi normatif: mengevaluasi implikasi KDKMP terhadap keadilan, otonomi, dan rasionalitas publik dengan merujuk pada literatur filsafat administrasi publik dan pendekatan kontekstual Indonesia. (Maley, 2004b; Powell & DiMaggio, 2023)

Pendekatan ini menekankan argumentasi konseptual dan penilaian normatif ketimbang pengujian hipotesis statistik. (Jackson, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arsitektur kelembagaan dan tujuan KDKMP**

KDKMP dirancang sebagai koperasi desa/kelurahan yang menjadi simpul strategis dalam mengelola berbagai aktivitas ekonomi desa dan menjadi kanal formal bagi akses program pemerintah. Narasi resmi menempatkan KDKMP sebagai simbol kebangkitan ekonomi desa yang mengintegrasikan semangat gotong royong dengan manajemen kelembagaan modern.

Di tingkat kelembagaan, KDKMP tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jejaring yang melibatkan kementerian teknis, lembaga keuangan negara, dan perangkat regulasi pusat yang mengatur struktur, persyaratan, dan tata kelola koperasi. Target pembentukan puluhan ribu KDKMP dalam waktu singkat mengindikasikan upaya konsolidasi dan standardisasi kelembagaan koperasi desa dalam satu kerangka nasional.

### **Digitalisasi dan ekosistem platform**

Digitalisasi diposisikan sebagai tulang punggung modernisasi KDKMP, dengan usulan kebutuhan anggaran sampai sekitar Rp 480 miliar untuk transformasi digital koperasi desa Merah Putih yang mencakup pengembangan aplikasi, infrastruktur, keamanan siber, dan integrasi data. PT Telkom Indonesia, misalnya, mengembangkan platform Digi Koperasi dengan fitur kasir koperasi, sistem akuntansi, dan konektivitas internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan KDKMP.

Portal dan aplikasi terkait KDKMP menyediakan mekanisme pendaftaran dan pengelolaan data koperasi secara online sehingga identitas, struktur organisasi, dan aktivitas usaha terekam dalam format yang seragam dan dapat diakses melalui dashboard nasional. Di sisi lain, ekosistem ini mendorong koperasi desa untuk bergantung pada platform, layanan internet, dan penyedia teknologi yang sebagian besar dikendalikan oleh aktor di luar komunitas desa.

### **Dashboard nasional dan rezim kinerja digital**

Dashboard nasional KDKMP memberikan kemampuan bagi pemerintah pusat untuk memantau secara agregat jumlah koperasi, tingkat digitalisasi, serta indikator kinerja lainnya lintas wilayah. Secara positif, hal ini dapat meningkatkan transparansi, pengawasan, dan basis data bagi pengambilan keputusan kebijakan terkait koperasi desa. (Kementerian PANRB, 2025; Siswarini, 2025)

Namun, dashboard juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan rezim kinerja digital di mana keberhasilan koperasi dinilai terutama melalui indikator kuantitatif yang didefinisikan pusat, seperti jumlah transaksi, laporan keuangan digital, dan tingkat pemanfaatan aplikasi. Dalam kerangka iron cage, mekanisme ini berpotensi menekan pengurus untuk menyesuaikan aktivitas dengan logika “yang terukur di sistem”, meskipun belum tentu selaras dengan kebutuhan atau nilai lokal yang lebih sulit dikuantifikasi.

### **KDKMP sebagai iron cage of digital corporatism**

Melalui kacamata Weber, KDKMP mencerminkan penguatan rasionalitas formal dalam bentuk aturan kelembagaan, prosedur pelaporan, dan indikator kinerja yang dikodifikasi ke dalam perangkat digital dan platform nasional. “Kandang besi” menjadi digital ketika kode dan algoritma menggantikan atau mempertebal peran regulasi tertulis dalam mengarahkan perilaku koperasi desa. (Maley, 2004b)

Dalam perspektif digital corporatism, KDKMP memperlihatkan pola kemitraan erat antara negara dan korporasi digital dalam menyediakan infrastruktur dan layanan teknologi yang menjadi tulang punggung pengelolaan koperasi desa. Koperasi desa dalam konfigurasi ini diposisikan sebagai “node” dalam jaringan ekonomi dan data berskala nasional, sehingga otonomi lokal berpotensi ter subordinasi oleh logika koordinasi terpusat dan kepentingan agregat.

### **Diskresi digital dan otonomi koperasi desa**

Secara normatif, koperasi desa idealnya menjadi lembaga demokrasi ekonomi yang memberi ruang luas bagi anggota untuk menentukan visi, aturan, dan praktik usaha sesuai kebutuhan lokal. Akan tetapi, ketika KDKMP dijalankan melalui platform digital yang telah memaketkan kategori transaksi, struktur pelaporan, dan logika penilaian kinerja, ruang variasi kelembagaan dan inovasi lokal menjadi terbatas.

Dalam situasi tersebut, diskresi pengurus bergeser menjadi diskresi digital, yaitu kemampuan terbatas untuk menafsirkan dan memanfaatkan fitur aplikasi dalam batas yang sudah ditentukan sistem. Ketika insentif fiskal maupun pengakuan keberhasilan dihubungkan dengan data dashboard, pengambilan keputusan cenderung menyesuaikan diri dengan logika sistem, bukan semata dengan hasil musyawarah anggota.

### **Refleksi normatif: keadilan, otonomi, dan rasionalitas publik**

Dari sudut pandang filsafat administrasi publik, paling tidak terdapat tiga isu normatif penting:

- **Keadilan:** Desa dengan infrastruktur digital dan kapasitas SDM yang terbatas berada pada posisi yang lebih lemah untuk memenuhi standar digital KDKMP, sehingga risiko reproduksi ketimpangan antarwilayah semakin besar meski program diklaim untuk pemerataan.
- **Otonomi:** Integrasi kelembagaan dan digital KDKMP yang kuat dari pusat dapat mengikis otonomi substantif desa dalam mendesain bentuk koperasi yang sesuai dengan kultur, struktur sosial, dan potensi ekonomi masing-masing.
- **Rasionalitas publik:** Proses penentuan desain platform, indikator kinerja, dan kebijakan data umumnya berlangsung di ranah teknokratis, dengan partisipasi terbatas dari anggota koperasi dan warga desa sebagai pihak yang paling terdampak.

Refleksi ini mengarah pada kebutuhan untuk menata ulang digitalisasi koperasi desa agar tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga sungguh-sungguh mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, kedaulatan komunitas, dan rasionalitas dialogis. (Zulkarnain, 2025)

## KESIMPULAN dan IMPLIKASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa KDKMP bukan sekadar program penguatan koperasi desa, tetapi juga cerminan konfigurasi *iron cage of digital corporatism* yang menggabungkan rasionalitas birokratis, infrastruktur digital, dan kemitraan korporasi dalam satu ekosistem yang sangat terstandarisasi. Meskipun membawa peluang perbaikan tata kelola dan efisiensi, konfigurasi ini berpotensi membatasi otonomi koperasi desa, memperkuat ketimpangan berbasis kapasitas digital, dan mengalihkan orientasi koperasi dari kepentingan anggota ke kepentingan indikator sistem.

Implikasi kebijakan yang dapat diajukan antara lain:

1. **Reorientasi desain digital KDKMP** agar menyediakan ruang diskresi profesional dan keleluasaan kelembagaan bagi koperasi desa, bukan sekadar memaksimalkan kepatuhan prosedural dan capaian indikator dashboard.
2. **Penguatan partisipasi berjenjang** (anggota, desa, kabupaten) dalam perancangan indikator kinerja dan fitur utama platform koperasi, sehingga metrik keberhasilan mencerminkan juga nilai-nilai lokal dan keadilan internal.
3. **Transparansi kemitraan dengan korporasi digital** termasuk aspek kepemilikan, keamanan, dan pemanfaatan data koperasi desa, guna mencegah ketergantungan yang tidak sehat dan potensi komersialisasi data publik.
4. **Peningkatan kapasitas yang bersifat teknis sekaligus kritis** bagi pengurus dan anggota koperasi, agar mampu menjadi subjek yang reflektif dalam berinteraksi dengan platform digital, bukan sekadar operator.

Secara akademik, penelitian ini membuka ruang riset lanjutan berupa studi lapangan mendalam pada beberapa KDKMP di berbagai daerah (misalnya Garut) untuk mengeksplorasi pengalaman konkret, strategi adaptasi, dan bentuk-bentuk resistensi lokal terhadap kandang besi digital tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Atlantis Press. (2018). *Towards localized and contextual public administration in Indonesia*. In *Proceedings of AAPA 2018*. <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018>.

Dian Siswarini. (2025, July 24). Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih terintegrasi secara nasional. *Telkom Indonesia Newsroom*. <https://www.telkom.co.id>

Dinkominfo Bantul. (2025, October 8). *Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih Bantul mantapkan langkah menuju smart city*. <https://diskominfo.bantulkab.go.id>

Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Profil dan panduan program*. <https://merahputih.kop.id>

Kementerian Koperasi dan UKM. (2025, September 8). Kebutuhan digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih Rp 480 miliar. *Tempo Ekonomi*. <https://www.tempo.co>

Kementerian PANRB. (2025, August 7). *MenPAN-RB tekankan digitalisasi Koperasi Merah Putih gerakkan ekonomi desa*. Dinas Koperasi & UKM NTT. <https://dinkopukm.nttprov.go.id>

LPDB-KUMKM. (2025, November 14). *Perkuat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, LPDB dorong peran koperasi besar*. <https://www.lpdb.go.id>

- Maley, T. (2004). Max Weber and the iron cage of technology. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 24(1), 69–86.
- Meng, T. (2025). Digital corporatism: State–business dynamics of digital state capacity building in China. *Journal of Chinese Political Science*.
- Mulyawan, A. (2025). Reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi publik di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 17(2), 101–115.
- Peng, B. (2021). Digital leadership: State governance in the era of digital technology. *Cultures of Science*, 4(3), 210–225.
- Powell, W. W. (2023). The iron cage redux: Looking back and forward. *Organization Theory*, 4 (1), 1-20. <https://doi.org/10.1177/26317877231221550>
- Putra, R., & Sari, D. (2024). Inovasi layanan publik di era smart governance: Pelajaran dari SP4N-Lapor!. *Cosmogov*, 10(1), 45–60.
- Rahman, A., & Nugroho, H. (2025). Transformasi birokrasi menuju layanan digital yang responsif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 29(1), 55–72.
- Song, W., Zhang, J., & Meng, T. (2022). Securing authoritarian capitalism in the digital age. *The China Journal*, 88, 1–24.
- Wargadinata, E. L. (2024). Amidst the euphoria of digitalization public services in municipal government: Raising public acceptance. *Jurnal Bina Praja*, 16(2), 77–90.
- Weber, M. (2001). *Economy and society*. University of California Press.
- Widodo, D., & Setyawan, B. (2022). Reforming public sector bureaucracy: A systematic literature review. *International Journal of Social Science Research*, 4(2), 33–48.
- Yuliani, L., & Prasetyo, F. (2025). Digitalisasi Koperasi Merah Putih dan sistem informasi kelembagaan. *Jurnal Kreatif*, 9(1), 88–104.
- Zulkarnain, I. (2025). Strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan literatur atas praktik terbaik dan tantangan global. *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 145–168.